

**Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi,
Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi**

Mas'odi

Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA)

Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan

Ibnumida03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mencoba melihat dan menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan juga religiopolitik Saudi beberapa tahun terakhir setelah Muhammad bin Salman (MBS) mengorbitkan ide Visi 2030. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana agensi MBS sebagai pemangku otoritas mengubah konstruksi sosial-keagamaan rakyat Saudi yang kemudian berdampak pada eksistensi Wahhabisme dan kelompok aliran keagamaan lainnya di Arab Saudi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Untuk mengeksplorasi problem akademik dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori otoritas R.B. Friedman dan dikombinasikan dengan teori praksis sosial Pierre Bourdieu. Hasil dari penelitian ini, MBS sebagai pemangku otoritas berhasil merombak sistem dan juga peraturan yang berlaku di Arab Saudi selama ini, mulai dari keluarga kerajaan, minyak, dan juga konservatisme agama yang bercorak Wahhabi. Khusus yang terakhir, MBS memang tidak pernah spesifik ingin meninggalkan Wahhabi, tetapi secara tegas akan menghapus ekstrimisme yang lahir dari dogma agama yang puritan, baik itu dari Wahhabi atau kelompok aliran keagamaan lainnya. MBS ingin mengubah Islam Saudi menjadi Islam moderat, di mana semua agama, ras, dan budaya bisa diterima. Semua pihak harus mematuhi, tidak terkecuali penganut Islam ala Wahhabi atau aliran keagamaan lainnya.

Kata kunci: MBS, Visi 2030, Wahhabi, dan Moderasi

This research tries to look at and to analyze social, economic, and also religion political conditions at Saudi in the last few years after Muhammad bin Salman (MBS) launched ideas for 2030 vision. This study will also analyze how the SBM agency as an authority changes the socio-religious construction of the Saudi people which then impacts the existence of Wahhabism and other religious groups in Saudi Arabia. This research uses qualitative research and is analytical descriptive. To explore academic problems in this study, the author uses the theory of authority R.B. Friedman and combined with Pierre Bourdieu's social praxis theory. As a result of this research, SBM as an authority has succeeded in overhauling the system and regulations that have been in force in Saudi Arabia so far, starting from the royal family, oil, and also religious conservatism which has a Wahhabi style. The Specifically for last SBM has never specifically intended to leave Wahhabi, but it will firmly eradicate extremism that arises from puritanical religious dogma, be it from Wahhabis or other religious groups. MBS wants to change Saudi Islam to the Islamic moderate, where all religions, races and cultures are acceptable. All parties must obey, including wahhabi muslim's-style or other.

Key Word: MBS, Vision 2030, Wahhabi, dan Moderation.

Pendahuluan

Arab Saudi merupakan negara kerajaan yang selama ini dikenal sebagai gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme. Di negeri *Haramain* ini Wahhabi lahir dan tumbuh menjadi sebuah ideologi besar, yang konon menaungi segenap kebijakan yang lahir di negeri kerajaan tersebut. Kombinasi antara seorang teolog sekaligus revivalis, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dengan seorang kepala Suku lokal Arab, Muhammad Ibn Saud, melahirkan sebuah gerakan politik keagamaan yang kemudian menjadi basis konstitusi yang berlaku di kerajaan Arab Saudi. Esposito menegaskan, kerajaan Arab Saudi sejak dari awalnya telah mengadakan campuran antara agama dan kekuasaan politik.¹ Akibatnya, narasi agama masuk dalam berbagai kebijakan politik Saudi sehingga memunculkan betasan-batasan yang tidak boleh disentuh oleh rakyat Saudi.

Kondisi tersebut tidak lepas dari sistem pemerintahan yang ditawarkan oleh al-Wahhab yang berbasis pada apa yang disebutnya sebagai pemerintahan Tuhan (*al-hukumah al-ilahiyah*). Konsep *al-hukumah al-ilahiyah* ini didasarkan pada doktrin Khawarij klasik yang terkenal yakni, *la hukma illa lillah*.² Menurut Aksin Wijaya, doktrin itu bermakna bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas alam ini karena Dia adalah Pencipta satu-satunya. Dengan adanya doktrin ini, al-Wahhab tidak menerima sistem pemerintahan lain di luar pemerintahan Tuhan yang dia maksud. Bahkan, dia menyifati pemerintahan manusia sebagai *thaghut*, dan umat Islam tidak boleh mengikuti *thaghut*, baik itu berupa sistem pemerintahan demokrasi, pola pikir sekularisme, dan ideologi nasionalisme.

Hubungan antara al-Wahhab dan Ibn Saud saling menguntungkan satu sama lain. Al-Wahhab bisa menanamkan doktrin pemerintahan Tuhan berbasis Wahhabi yang diyakininya. Sedangkan Ibn Saud mendapatkan keuntungan politik dari doktrin religiopolitik yang ditawarkan oleh al-Wahhab. Untuk

¹ John L. Esposito, *Unholy War*, trans. oleh Arif Maftuhin (Yogyakarta: LKiS, 2003), 08.

² Muhammad Said Al-Asymawi, *Ma'alim al-Islam*, 2 ed. (Beirut: al-Instishar al-'Arabi, 2004), 88-91; Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan* (Bandung: Penerbit Mizan, 2018), hlm. 40.

memperkuat posisinya di hadapan penguasa Arabia itu, al-Wahhab menawarkan konsep ketaatan mutlak masyarakat pada penguasa, menolak musyawarah, dan melarang mereka keluar dari suatu negara.³ Tawaran al-Wahhab tersebut turut menjadikan Arab Saudi menganut sistem pemerintahan Monarkhi-absolut dengan corak keberagaman yang ultra-konservatif. Dengan sistem pemerintahan tersebut tidak ada proses pemilihan langsung dalam pergantian penguasa kerajaan Saudi. Kekuasaan sang raja diwariskan secara turun temurun melalui trah keluarga Saud. Sistem ini tentu menjadi “berkah” tersendiri bagi keluarga kerajaan.

Romantisme antara Wahhabi dan Kerajaan Saudi sudah berjalan sejak puluhan tahun silam. Hubungan di antara keduanya semakin erat ketika petrodollar mengalir deras dari sumur-sumur minyak Saudi. Akibatnya, ekspansi Wahhabi semakin meluas, dan stabilitas kerajaan semakin terjamin dengan sistem pemerintahan yang terilhami dari ideologi Wahhabi. Namun, apakah kemesraan antara Wahhabi dengan Kerajaan Saudi akan tetap abadi? Tentu tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Fakta itu yang terlihat antara Wahhabi dan Kerajaan Saudi beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, hubungan antara keduanya sejak awal bersifat politis. Hasil dari sebuah tawar-menawar demi kepentingan masing-masing.

Hubungan Wahhabi dan Kerajaan Saudi mulai berjarak sejak Muhammad bin Salman (selanjutnya ditulis MBS), sang putra mahkota kerajaan, berkeinginan untuk mereformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini berjalan di Saudi. Khususnya kebijakan yang bercorak eksklusif, yang diwarisi oleh ideologi Wahhabi. Kebijakan tersebut diambil MBS bertujuan untuk mengalihkan sumber ekonomi Saudi dari sektor minyak ke sektor lain, seperti pariwisata. Proyek besar MBS tersebut kemudian disebut dengan istilah “Vision 2030”.

³ Muhammad Said Al-Asymawi, *Ma'alim al-Islam*, 2 ed. (Beirut: al-Instishar al-'Arabi, 2004), 88-91; Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, hlm. 40-41

Untuk sukseksi proyek besarnya tersebut, MBS mau tidak mau harus merubah kebijakan-kebijakan Saudi yang selama ini cenderung eksklusif, kaku, dan membatasi ruang gerak rakyat Saudi menjadi lebih inklusif dan bebas. Dalam artian, MBS suka tidak suka harus me-*review* kembali warisan Wahhabisme yang selama ini menjadi *basic* dalam struktur pemerintahan Saudi. Pertanyaannya sekarang, apakah MBS akan betul-betul meninggalkan Wahhabisme yang sudah puluhan tahun membersamai keluarga kerajaan demi ide reformasinya? Dan bagaimana dengan masa depan Wahhabisme Arab Saudi di tengah proyek besar MBS tersebut? Dua pertanyaan ini penting dijawab untuk memetakan kemana arah politik dari dua “sahabat” ini di masa depan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dan menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan juga religiopolitik Saudi beberapa tahun terakhir setelah MBS mengorbitkan ide Visi 2030 tersebut. Penulis juga akan menganalisis bagaimana agensi MBS sebagai pemangku otoritas mengubah konstruksi sosial-keagamaan rakyat Saudi yang kemudian berdampak pada eksistensi Wahhabisme dan kelompok aliran keagamaan lainnya di Arab Saudi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengandalkan sumber-sumber pustaka sebagai dasar dan dikolaborasi dengan data-data terbaru di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan mengelaborasi data-data yang ada. Untuk mengeksplorasi problem akademik dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori otoritas R.B. Friedman dan dikombinasikan dengan teori praksis sosial Pierre Bourdieu.

Sejarah Singkat Lahirnya Wahabi

Wahabisme merupakan suatu paham atau ajaran keagamaan yang pertama kali muncul di Arab Saudi sekitar abad ke-18. Paham ini bersandar pada paham keagamaan yang dikenalkan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1791). Ia merupakan salah satu ulama terkemuka yang pemikirannya kemudian menjadi wacana dominan di seluruh jazirah Arab. Sejarah pemikiran

Muhammad ibn Abd al-Wahhab tidak lepas dari pengaruh riwayat pendidikan yang dia tempuh. Dia mempelajari fiqh dan teologi di Makah dan Madinah dan mengambil Ibn Taimiyah sebagai teladannya.⁴ Pengaruh Ibn Taimiyah begitu kuat mengakar dalam pemikiran al-Wahhab. Karakter keberagamaan yang kaku dan puritan al-Wahhab sama persis dengan karakter keberagamaan yang dimiliki oleh Ibn Taimiyah.

Inti dari teologi dan gerakan al-Wahhab adalah doktrin *tauhid*, sebuah monoteisme mutlak yang tercermin dari penyebutan diri kaum Wahabi sebagai “kaum pengesa” (*muw^{ah}hidun*)-orang-orang yang mengesakan Tuhan.⁵ Dengan teologi yang dibangun oleh al-Wahhab tersebut melahirkan sebuah narasi fundamental dan termanifestasi dalam sebuah gerakan yang eksklusif. Para pengikut Wahabi mengharamkan praktik agama yang bersinggungan dengan sebuah tradisi. Mereka juga membid’ahkan suatu praktik agama yang dianggap baru dan keluar dari otentesitas yang diajarkan nabi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hamid Algar (2011), konsep ini (bid’ah) didefinisikan sebagai “perkara baru yang tidak diikuti oleh para sahabat atau pengikut (*tabi’in*) dan bukan bagian dari apa yang diharuskan oleh dalil hukum (*dalil syar’i*).⁶ Hamid melanjutkan bahwa bid’ah biasanya dipasangkan sebagai lawan negatif dari sunnah.

Berdasarkan pemahaman teologi yang dibangun dalam ajaran Wahabi, membuat para pengikut Wahabi cenderung sentimen dan berlaku anarki dalam menyikapi perbedaan. Misalnya, mereka menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah dengan alasan syirik. Tempat-tempat suci, makam-makam kuno juga tidak luput dari penghancuran yang mereka lakukan. Berkaitan dengan aktivitas tersebut Esposito (2003) menyampaikan, mereka tak mengecualikan makam-makam sakral Muhammad dan para Sahabatnya di Mekah dan

⁴ Esposito, *Unholy War*, 59.

⁵ Esposito, *Unholy War*, 59.

⁶ Hamid Algar, *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, trans. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Democracy Project, 2011), 49-50.

Madinah maupun situs ziarah Syi'i di Karbala (di Iraq modern) yang ditempati makam Hussein.⁷

Ajaran Wahhabi tidak hanya menjadi suatu paham keagamaan yang mengawatirkan di awal kelahirannya, namun hingga dewasa ini ajaran Wahabi menjadi salah satu paham yang banyak mendapat perhatian. Sebagaimana yang disampaikan Esposito, Wahhabi menggambarkan corak Islam ultrakonservatif dan puritan Saudi Arabia: harfiah, kaku, dan eksklusif.⁸ Wahhabi menyebarkan ajaran Islam yang “murni”, tidak tercampuri dengan tradisi-tradisi atau lainnya. Dengan landasan teologi yang mereka bangun membuat ajaran Wahhabi menjadi ajaran yang fundamental. Wahhabi menjadi salah satu paham yang sering menanam benih kebencian ketika berhadapan dengan corak keberislaman yang berbeda dengan paham yang mereka yakini.

Menurut Olivier Roy dalam bukunya *Globalized Islam: The Search for a New Ummah* (2004), sebagaimana dikutip Ihsan Ali-Fauzan dalam pengantar buku Wahhabisme karya Hamid Algar (2011), bahwa Wahhabisme sebagai cikal-bakal model keberagamaan Islam yang disebutnya “*neo-fundamental*”, yang dicirikan oleh pandangan bahwa merekalah satu-satunya kelompok Muslim yang benar dan tidak mungkin ada di luar aliran mereka.⁹ Tidak ada kata kompromi dalam corak keberagamaan Wahhabisme. Yang berbeda dengan konsep keberislaman al-Wahhab maka tidak bisa diterima. Corak berpikir seperti itu, menurut Aksin Wijaya disebut sebagai metode berpikir dialektika-dikotomis, yaitu mengandaikan adanya dua orang yang beradu argumen untuk mempertahankan pendapatnya dalam suatu perdebatan.¹⁰

⁷ Esposito, *Unholy War*, 59.

⁸ Esposito, *Unholy War*, 130.

⁹ Algar, *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, 14.

¹⁰ Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Hermeneutis-Ideologis* (Yogyakarta: LKiS, 2009); Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, 36.

Metode berpikir dikotomis seperti itu tidak menerima jalan tengah. Jika tidak beriman, berarti kafir.¹¹ Karena itu, persepsi agama yang terilhami dari Wahabisme melahirkan corak keberagamaan yang keras, khususnya di kawasan Timur Tengah. Tak pelak, hingga dewasa ini Timur Tengah selalu menjadi medan perang yang selalu membara. Konflik terjadi di mana-mana dan selalu menyala membersamai mutif lain yang ada di belakangnya, semisal kepentingan ekonomi dan politik. Timur Tengah menjadi salah satu barometer betapa kekakuan dalam beragama menjadi salah satu pemicu perpecahan. Satu sama lain saling menghalalkan darah hanya karena perbedaan madzhab keagamaan.

Kendati demikian, kalau dilihat dalam perspektif geopolitik, mutif agama tidak menjadi faktor tunggal dalam konflik Timur Tengah yang tidak berkesudahan. Namun, patut disadari, bahwa kejumudan dalam beragama, kekakuan dalam menafsirkan agama, dan kuatnya klaim kebenaran (*truth claim*) yang dimonopoli kelompok tertentu, memungkinkan mutif lain gampang masuk menyalakan semangat untuk saling membenci satu sama lain. Fenomena ini yang terpampang jelas dalam sejarah konflik Timur Tengah selama ini, di mana ideologi keagamaan sering beriringan dengan ideologi gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Dalam konteks ini, Wahabi pernah mengambil peran dalam kosntelasi perpolitikan di Arab Saudi pada khususnya dan kawasan Timur Tengah pada umumnya, bahkan hingga kini.

Wahabisme: dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Politis

Wahhabisme semakin mendapatkan ruang, khususnya di Timur Tengah setelah al-Wahhab bersekutu dengan Muhammad ibn Saud, seorang kepala suku di Arab. Persekutuan al-Wahhab dan Ibn Saud merupakan upaya Ibn Saud untuk mengukuhkan kekuasaannya di antara suku-suku Arab lainnya. Ibn Saud berupaya menyatukan suku-suku Arab dengan menggandeng al-

¹¹ Khaled M. Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*, trans. oleh Helmy Musthafa (Jakarta: Serambi, 2005), 65; Wijaya, *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*, 36.

Wahhab dengan ideologi yang dimilikinya. Dalam catatan Esposito menyebutkan, Ibn Saud menggunakan Wahabisme sebagai cita-cita religius untuk melegitimasi jihadnya dalam menaklukkan dan menyatukan suku-suku Arabia, mengubah akidah mereka dalam versi Islam yang puritan ini.¹²

Wahabisme digunakan oleh Ibn Saud untuk melegitimasi gerakan politik yang dilakukan untuk menguasai suku-suku Arab. Dengan ajaran Wahabi sebagai patron gerakan politik Ibn Saud melahirkan sebuah kebijakan yang keras dalam merespon gesekan ataupun perlawanan yang muncul dari bawah. Sebagaimana ajaran Wahabi, Ibn Saud menghalalkan darah pihak-pihak lain yang tidak sepemikiran dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak keluarga Saud.

Visi Wahabi mendunia pada dekade 1960-an sebagai respon terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh nasionalisme dan sosialisme Arab.¹³ Pada dekade ini ada kekuatan lain yang muncul ke permukaan dan mengancam *status quo* kerajaan Arab konservatif. Kekuatan itu muncul dari pemimpin Mesir yaitu Muhammad Nasser, yang dikenal menganut ideologi sosialisme sekuler progresif. Pengaruh Nasser begitu kuat di jazirah Arab, khususnya dalam melawan sistem atau kebijakan negara teokratik absolut seperti Arab Saudi. Kemunculan Nasser menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penguasa-penguasa Arab, khususnya bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati romantisme hidup dengan kekayaan yang melimpah. Para penguasa Arab yang hidupnya berlimpah dengan petrodollar yang terus mengalir dari penjualan kekayaan minyaknya.

Nasserisme (sebutan untuk aliran pemikiran Nasser) menjadi momok yang menakutkan, karena Nasser dengan ideologi sosialisme yang dia bangun menjanjikan revolusi sosial bagi masyarakat Arab. Kekhawatiran penguasa-penguasa Arab membuat raja Arab semakin mesra dengan Wahabi. Bersanding dengan Wahabi, kerajaan Arab berupaya meng-*counter* pengaruh Nasserisme

¹² Esposito, *Unholy War*, 59.

¹³ Esposito, *Unholy War*, 130.

dengan membuat kebijakan Pan-Islamisme. Di bawah kepemimpinan Pangeran (kemudian menjadi Raja) Faisal, orang-orang Saudi memperjuangkan kebijakan pan-Islam menentang pan-Arabisme Nasser yang “sekuler-sosialis” dan ikatannya dengan “komunisme ateis” di Soviet dan Eropa Timur.¹⁴

Tidak hanya pihak kerajaan Arab Saudi yang merasa terganggu dengan Nasserisme, namun juga Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar di bumi Arab, khususnya dengan kekayaan minyaknya. Begitupun juga, tidak hanya Nasser yang menjadi ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah namun juga Mohammed Mossadeqh yang berasal dari Iran yang selalu mendengungkan ide nasionalisme. Dua tokoh penting Timur Tengah ini secara jelas menentang dominasi asing di Timur Tengah. Berkenaan dengan ini Kumar berpendapat sebagai berikut:

Jika Mossadeqh mewakili potensi terhadap apa yang penguasa nasionalis sekuler bisa lakukan terhadap Barat atas kepentingan minyaknya (ia menasionalisasi industri minyak), Nasser mewakili skenario mimpi buruk Washington. Mesir memang tak memiliki kekayaan minyak, tapi ideologi Nasserisme yang menitikberatkan pada persatuan seluruh bangsa Arab, coba mempersatukan negara-negara kota yang maju secara teknologi dengan kelas pekerja yang trampil dalam jumlah besar, dengan negara-negara penghasil minyak yang kaya-raja. Kombinasi Kairo dan Riyadh jelas bakal mempersulit dominasi Barat terhadap sumber-sumber minyak di kawasan tersebut.¹⁵

Pengaruh Nasser dan Mossadeqh membuat Amerika Serikat mendekati Arab Saudi untuk mengimbangi kekuatan Nasser. Amerika menggunakan Islam sebagai jembatan politik untuk mengisolasi pengaruh Nasser. Dalam posisi ini, Arab Saudi menjadi tumpuan utama Amerika mengingat corak keberislaman Saudi yang dominan, apalagi setelah mendapat sokongan dari Wahabi. Corak keberislaman Wahabi yang puritan menjadi daya tarik sendiri bagi Amerika untuk mendekati dan menjalin kerjasama dengan Saudi untuk melawan Nasser. Sebagaimana pernyataan Eisenhower yang dikutip oleh Kumar; “Sang Raja adalah pilihan logis dalam hal ini; setidaknya dia mengaku

¹⁴ Esposito, *Unholy War*, 130

¹⁵ Deep Kumar, *ISLAM POLITIK Sebuah Analisis Marxis* (Jakarta: Resistbook & IndoPROGRESS, 2011), 28.

sebagai anti Komunisme, dan dia menikmati – dalam dasar-dasar agama – kedudukan yang tinggi di antara seluruh negara-negara Arab”.¹⁶

Untuk menghambat pengaruh Nasser, baik Saudi atau pun Amerika sama-sama menggunakan pengaruh gerakan Islam arus utama, seperti Ikhanul Muslimin dan Jamaat Islamiyah. Sebagaimana yang diketahui bahwa di Mesir Nasser menghalangi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di Mesir mendapatkan kontrol yang ketat, khususnya di masa pemerintahan Nasser. Dalam kesempatan ini Saudi dan Amerika memanfaatkan kekuatan Ikhwan untuk melawan Nasser. Meski memiliki beberapa perbedaan yang mendasar, mereka memiliki visi keagamaan yang sama berdasarkan rujukan pada sumber-sumber fundamental Islam dan antipasti pada musuh bersama – Nasserisme, sekularisme, dan komunisme.¹⁷

Dari sinilah Arab Saudi membangkitkan Islamisme untuk menopang kepentingan politik kekuasaannya. Kebangkitan Islamisme tersebut tidak lepas dari pengaruh Wahabi yang keberislamannya bercorak eksklusif-puritan. Pengaruh Wahabi semakin kuat setelah digerakkan oleh petrodollar, khususnya setelah terjadi embargo minyak pada tahun 1973. Dengan sumber daya yang mumpuni, Arab Saudi semakin gencar menggerakkan Islamisme dengan corak keberislaman Wahabi di Timur Tengah, bahkan ke seluruh dunia. Hanya dengan petrodollar Arab Saudi sedikit demi sedikit bisa menanamkan pengaruh politiknya di kawasan Arab, bahkan dunia. Karena pada dasarnya, secara geopolitik, negara kerajaan tersebut kurang mempunyai legitimasi politik yang kuat dibanding beberapa negara tetangganya di kawasan Timur Tengah, khususnya di era nasionalisme sekuler.

Beberapa tahun setelah terbebas dari bayang-bayang Nasserisme, di akhir tahun 1970-an, Arab Saudi harus menghadapi gelombang kekuatan baru yang datang dari negeri para mullah yaitu Republik Islam Iran. Gelombang revolusi Iran yang pecah pada 1979 menjadi peristiwa besar yang memantik banyak

¹⁶ Deep Kumar, *ISLAM POLITIK Sebuah Analisis Marxis*, 29.

¹⁷ Esposito, *Unholy War*, 131.

perhatian, baik di kawasan Timur Tengah maupun Barat. Besarnya pengaruh revolusi Iran ini di kawasan Timur Tengah dikarenakan kemenangan revolusi, yang digerakkan oleh Imam Khomeini, menjadi pelita harapan yang mampu menerangi sudut-sudut hari Muslimin; kaum yang sampai saat itu masih selalu berpikiran bahwa untuk melepaskan diri dari hegemoni adidaya, mereka harus mencari perlindungan dari kekuatan adidaya yang lain.¹⁸

Iran telah membuktikan, bahwa mencari persinggahan di bawah bayang-bayang kekuatan negara lain bukanlah satu-satunya pilihan. Iran sudah berhasil melakukan revolusi secara mandiri tanpa menjalin kontrak politik dengan negara atau kekuatan dari luar. Kesadaran untuk melepaskan diri dari hegemoni rezim boneka bentukan AS, Muhammad Reza Pahlevi, sudah mengakar dalam diri rakyat Iran. Karena itu, revolusi Iran berhasil menumbangkan otoritarianisme Shah, yang mana juga dipahami sebagai kekalahan besar AS di Iran. Tentu mafhum kalau peristiwa besar tersebut mendapat banyak perhatian dari masyarakat dunia. Bahkan, revolusi Iran kemudian ditengarai mengilhami bangkitnya gerakan-gerakan politik Islam di berbagai belahan dunia.

Runtuhnya rezim boneka Shah di Iran tidak bisa diterima oleh AS sama sekali. Apalagi dalam peristiwa revolusi Iran 1979 terjadi penyanderaan puluhan diplomat AS dan gedung kedutaan AS berhasil diduduki oleh massa revolusi. Tidak hanya AS yang was-was dengan revolusi tersebut, beberapa negara di kawasan Timur Tengah juga merasa jengah dengan peristiwa tersebut. Ada kekhawatiran di kalangan para pemimpin Arab bahwa “virus” revolusi akan cepat menyebar dan mengganggu stabilitas negara mereka masing-masing. Terlebih negara-negara Arab yang sistem pemerintahannya berbentuk monarkhi-absolut, yang sudah mapan dan mengagungkan *status quo*.

¹⁸ Ahmad Sahide, *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013), 91.

Arab Saudi merupakan salah satu negara yang turut merasakan kekhawatiran dengan ekspor revolusi dari negara para mullah tersebut. Bagi sebagian pihak, revolusi Iran merupakan sebuah kemenangan Islam atas imperialisme Barat, yang melahirkan nilai inspiratif tersendiri. Namun bagi Arab Saudi revolusi Iran dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan Saudi pada khususnya dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. Revolusi Islam Iran diasumsikan dengan terorisme, penyanderaan, serangan ke kedutaan-kedutaan, dan promosi aktivitas revolusioner.¹⁹ Asumsi negatif atau streatif tersebut muncul dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah pasca revolusi Islam Iran.

Peta geopolitik Timur Tengah pasca revolusi dapat dilihat dari penjelasan Musthafa Abd. Rahman, yang kemudian dikutip oleh Ahmad Sahide, pakar Timur Tengah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menurut Musthafa, kebangkitan politik Syi'ah pasca Revolusi Islam Iran membawa peta politik Timur Tengah ke dalam dua kubu utama. *Pertama*, yaitu kubu Amerika Serikat dengan sekutunya yang mengusung proyek Timur Tengah Raya dengan isu demokratisasi sebagai andalannya. Negara yang tergabung dalam kubu AS ini antara lain Mesir, Jordania dan enam negara Arab Teluk (anggota GCC) yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Kesultanan Oman, dan Uni Emirat Arab. *Kedua*, Kubu Iran dan sekutunya dengan membawa misi Timur Tengah yang Independen, bernapaskan Islam dan bebas dari pengaruh asing. Kelompok anti AS (asing) ini terdiri dari Iran, Suriah, Gerakan Hizbullah, kelompok Hamas, dan kelompok perlawanan Sunni dan Syi'ah di Irak, dan Ikhwanul Muslimin di beberapa negara Arab, serta Tanzim a-Qaeda.²⁰

Kubu-kubuan tersebut bukanlah fenomena baru. Terlebih antara Arab Saudi dan Iran kelihatannya semakin sulit dipertemukan. Revolusi Iran masih menjadi ancaman yang cukup mengganggu kenyamanan keluarga kerajaan.

¹⁹ Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih* (Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Study Club, 2003), 186.

²⁰ Musthafa Abd. Rahman, "Timur Tengah Terbelah Dua," *Kompas*, 14 Desember 2007; Sahide, *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*, 103.

Karena itu, Saudi pasca revolusi Iran semakin gencar menyebarkan ideologi Wahhabisme untuk meredam pengaruh revolusi Islam. Ekspansi kerajaan Saudi tidak hanya dalam negeri, namun sampai ke luar negeri. Saudi mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dibiayai negara untuk menyebarkan visi dan ideologi pan-Islam yang berbasis Wahhabi versi dirinya.²¹ Melalui organisasi-organisasi tersebut Saudi mengucurkan dana besar-besaran untuk memfasilitasi ekspor Islamisme ala Wahhabi. Salah satu kegiatannya misalnya bergerak dibidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dakwah dan lainnya.

Reformasi Arab Saudi dan Diversifikasi Ekonomi

Muhammad bin Salman (MBS) adalah putera sulung raja Salman dari istrinya yang ketiga, Fahda al-Hithalayn. MBS termasuk salah satu putera favorit raja Salman. Karir politik sang putera mahkota terbilang melesat dengan cepat. Secara khusus, pada Januari 2015 ia diangkat menjadi kepala Pengadilan Kerajaan Saudi dan Menteri Pertahanan pada saat yang sama, dan menjadi menteri pertahanan termuda di dunia. Satu minggu kemudian dia ditunjuk sebagai ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, sementara pada bulan April tahun yang sama dia diangkat sebagai Wakil Pangeran Mahkota; dengan kata lain, ia berada di urutan ketiga di atas takhta di belakang Putra Mahkota Mohammed bin Nayef.²²

MBS merupakan arsitek utama dalam proyek reformasi Arab Saudi yang kemudian dikenal dengan istilah "Vision 2030". Proyek reformasi tersebut resmi diumumkan MBS pada 25 April 2016, tidak lama setelah ia diangkat menjadi putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Gebrakan sang putera Mahkota yang masih "belia" itu mengagetkan banyak pihak dan penuh perdebatan, khususnya di kalangan keluarga kerajaan sendiri. Kebijakan tersebut

²¹ Esposito, *Unholy War*, 131.

²² Saverio Violi, "Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to 'Vision 2030'" (Ca' Foscari University of Venice, 2016), https://www.academia.edu/31959468/Saudi_Arabia_Faced_with_Modernity_from_the_Demographic_Transition_to_Vision_2030.

menghangatkan konstelasi politik di lingkungan kerajaan. Pendakiannya yang cepat ke rezim atas menimbulkan ketidakpuasan dan kecemburuan di antara anggota keluarga kerajaan; khususnya, fakta bahwa MBS mewakili perantara bagi siapa saja yang ingin berbicara dengan ayahnya Raja Salman, adalah sumber kebencian terhadap pangeran Al Saud lainnya.²³

Betapa pun panasnya suhu politik di lingkungan Kerajaan, MBS dengan tangan dinginnya, menjadikan tahun 2016 sebagai tahun penting bagi masa depan Arab Saudi. Misi besar yang ingin dicapai MBS dalam visi 2030 tidak lain untuk mengentaskan berbagai persoalan yang mendera Arab Saudi, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir, mulai dari ekonomi, sosial, dan juga politik. MBS tidak bisa menutup mata bahwa ada penurunan harga minyak dunia, yang merupakan penyokong utama ekonomi Saudi. Sebuah data menyebutkan, 80% sampai 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Arab Saudi secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya minyak.²⁴ Sedangkan di sisi lain Arab Saudi harus menanggung beban ekonomi yang cukup besar, mulai dari pembelian perlengkapan persenjataan yang mahal, meningkatnya konsumsi energi domestik, tingginya angka pengangguran, dan persoalan sosial lainnya.

Tentu Arab Saudi harus selalu awas dengan persoalan yang bisa saja datang mendera akibat melemahnya harga minyak dunia. Karena itu, visi 2030 menjadi semacam obat penawat untuk mengatasi kecanduan negeri Monarkhi tersebut pada minyak. Visi 2030 yang salah satu proyek besarnya bergerak di bidang pariwisata bertujuan untuk mendeversifikasi ekonomi Kerajaan Arab Saudi agar tidak lagi bergantung pada minyak. Bahkan kekhawatiran Kerajaan

²³ Benjamin Barthe, "Le fils du roi Salman, un héritier pressé et ambitieux en Arabie saoudite," *Le Monde*, 2016, www.lemonde.fr/international/article/2016/01/22/mbs-un-heritier-presse-et-ambitieux-en-arabie-saoudite_4852058_3210.html. Accessed 31 December 2016.; Violi, "Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to 'Vision 2030.'"

²⁴ Annalisa Perteghella, ed., *Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead* (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2018), https://www.academia.edu/39510960/Saudi_Arabia_at_a_Crossroads._Reforms_and_Uncertainties_Ahead; G. Bahgat, "Lower for Longer: Saudi Arabia Adjusts to the New Oil Era," *Middle East Policy* 23, no. 3 (2016): 39–48.

Saudi terhadap masa depan minyaknya dicantumkan dalam teks visi 2030 itu sendiri: "Kami tidak akan membiarkan negara kami berada di bawah pengaruh volatilitas harga komoditas atau pasar eksternal."²⁵ Oleh karena itu, deversifikasi ekonomi yang tertuang dalam ide reformasi menjadi harapan baru untuk menyegarkan sektor ekonomi Arab Saudi, yang sumber ekonominya lebih terbuka dan beragam, tidak hanya bergantung pada minyak.

Sektor pariwisata diharapkan bisa membantu meringankan beban pemerintah Saudi untuk mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir persentase warga negara Saudi di bawah usia 30 tahun yang menganggur, tetap sekitar 30%.²⁶ Peralihan ke sektor pariwisata juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Saudi, khususnya para pemuda Saudi, yang selama ini selalu hidup nyaman berkat distribusi sumber daya yang berbentuk layanan publik, subsidi dan pelayanan lainnya dari pemerintah. Alih-alih secara aktif berkontribusi kepada negara dengan pajak mereka, warga negara menjadi penerima kekayaan, berhak atas pendapatan karena kebangsaan mereka. Kekayaan individu dengan demikian tidak terkait erat dengan produktivitas individu, tetapi lebih merupakan hasil dari komersialisasi sumber daya alam negara yang dikelola oleh negara.²⁷ Persoalan ini yang tentu menjadi beban masalah Saudi selama ini, yang kemudian ingin diperbaiki oleh MBS melalui visi 2030 tersebut.

Tidak sebatas isapan jempol, MBS tidak tanggung-tanggung dalam upaya menghilangkan kecanduan rakyat Saudi pada minyak, yaitu dengan membangun kota bisnis yang kemudian diberi nama NEOM. Dana yang dikucurkan untuk membangun mega-proyek NEOM ini diperkirakan akan menelan biaya 500 miliar dolar AS atau setara dengan Rp. 6.700 triliun. Kota

²⁵ Kingdom of Saudi Arabia, Initiatives and Efforts to Combat Terrorism and Terror Financing, issued 2015, embassies.mofa.gov.sa/sites/Denmark/EN/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/Kingdom-of-Saudi-Arabia-Initiatives-and-Efforts-to-Combat-Terrorism-and-Terror-Financing.aspx; Violi, "Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to 'Vision 2030.'"

²⁶ "Saudi youth unemployment forecast to exceed 42% by 2030," *Arabian Business*, 26 November 2016; Perteghella, *Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead*.

²⁷ Perteghella, *Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead*.

bisnis ini nantinya akan beroperasi di atas tanah seluas 26.500 kilometer persegi, mengangkangi Arab Saudi, Yordania, dan Mesir. Mega proyek sang putera mahkota ini nanti akan menjadi zona eksklusif yang beroperasi secara otonom, tanpa campur tangan pihak kerajaan. Gambaran NEOM di masa depan adalah sebuah wilayah yang dioperasikan dengan teknologi tingkat tinggi dan akan menjadi “rumah” bagi orang-orang yang memiliki keterampilan kelas dunia dalam industri bioteknologi dan makanan.²⁸

Tentu MBS tidak bisa berjalan sendiri untuk menggerakkan proyek raksasanya tersebut. MBS membutuhkan kerjasama para investor untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Untuk memudahkan datangnya investor MBS tidak segan mengambil langkah besar yang bersinggungan langsung dengan sistem sosial-keagamaan Saudi yang selama ini berada di bawah pengaruh Wahhabisme. MBS dengan wacana reformasinya berusaha mengubah wajah Saudi yang dikenal ultra-konservatif menjadi lebih inklusif. Salah satu contoh konkrit, misalnya, MBS menyingkirkan fatwa-fatwa ulama yang dianggap menghambat, misalnya terkait hak-hak perempuan Arab Saudi, karena untuk mencapai Visi 2030, kaum perempuan Saudi harus produktif dan menjadi mitra sejajar dengan laki-laki sehingga bisa ikut serta secara aktif memajukan negara.²⁹

Wahhabisme di Persimpangan Jalan

Arab Saudi dewasa ini berbeda dengan Arab Saudi beberapa tahun silam sebelum Visi 2030 diluncurkan. Perbedaan itu nyata terlihat dalam konstruksi sosial masyarakat Saudi yang tanpak lebih bebas mengekspresikan diri di ruang publik. Rakyat Saudi kini sudah bebas bermain dan nonton konser musik, nonton pertandingan sepak bola, dan mencari hiburan lainnya di luar rumah. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, tapi kaum perempuan pun bebas

²⁸ J. Kinninmont, “Vision 2030 and Saudi Arabia’s Social Contract: Austerity and Transformation,” *Middle East and North Africa Programme*, 2017.

²⁹ Ikhwanul Kiram Mashuri, “Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?,” *Republika*, 2017, <https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/11/06/ooyiz5440saudi-tak-lagi-mengekspor-wahabi>.

beraktivitas di ruang publik. Bahkan, perempuan sudah bisa menyetir kendaraan sendiri setelah pemerintah Saudi secara resmi mengeluarkan izin pada Juni 2018 silam.

Adalah MBS yang menjadi aktor penting di balik perubahan besar yang terjadi di Saudi. Atas dasar reformasi birokrasi, diversifikasi ekonomi, dan terciptanya moderasi keagamaan di Saudi, MBS mengubah haluan negara Monarkhi tersebut dari yang awalnya ultra-konservatif menjadi lebih moderat dan terbuka menerima perkembangan zaman. Langkah besar yang diambil MBS tidak lepas agensinya sebagai pemangku otoritas Saudi setelah dia diangkat menjadi putera mahkota. Langkah yang diambil MBS merupakan representasi dari langkah politik yang diambil oleh ayahnya, raja Salman. Meskipun MBS masih menjabat sebagai putera mahkota tetapi dia menjadi pemegang kendali atas segala kebijakan yang diambil oleh pihak Kerajaan. MBS memiliki otoritas untuk mengoperasikan peremajaan sistem politik Saudi dari sistem politik yang sebelumnya dioperasikan oleh generasi tua Saudi.

Secara sederhana dapat dilihat, MBS berupaya untuk mengubah citra Saudi yang dikenal konservatif, kaku, dan fundamental menjadi lebih moderat dan terbuka. Langkah tersebut diambil untuk mengubah persepsi dunia internasional bahwa Saudi yang sekarang berbeda dengan Saudi sebelumnya. Menurut MBS, Arab Saudi sekarang berbeda dengan Arab Saudi 30 tahun silam. Dalam sebuah wawancara dengan *The Guardian*, MBS menegaskan dan bersumpah untuk mengembalikan negara itu ke "Islam moderat"³⁰, yang menurutnya sudah berubah pasca peristiwa revolusi Islam Iran 1979.

Dalam wawancara tersebut MBS menyangka bahwa revolusi Iran 1979 telah mengeksport pengaruh "negatif" bagi Arab Saudi dan kawasan Timur Tengah pada umumnya. MBS berkilah bahwa doktrin kaku yang selama ini dianut pemerintah Saudi untuk "mengkondisikan" masyarakat merupakan sebuah respon untuk mengahalu pengaruh revolusi Iran. Revivalisme Islam

³⁰ Martin Chulov, "I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince," *The Guardian*, 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince%0D>.

Saudi yang bercorak Wahhabisme seakan mau ditutupi oleh MBS dengan membawa narasi revolusi Iran sebagai dalang utama atas lahirnya Islam konservatif di Saudi. Dia menegaskan bahwa ekstrimisme muncul di Saudi pasca Imam Khoemeini berhasil menumbangkan rezim Shah Pahelvi di Iran. Dalam kesempatan tersebut MBS menyampaikan pernyataan berikut:

“Apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir bukanlah Arab Saudi. Apa yang terjadi di wilayah ini dalam 30 tahun terakhir bukanlah Timur Tengah. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, orang ingin menyalin model ini di berbagai negara, salah satunya adalah Arab Saudi. Kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan masalahnya menyebar ke seluruh dunia. Sekarang adalah waktunya untuk menyingkirkannya.”³¹

Namun, pernyataan MBS tersebut berbeda dengan data-data yang tertuang di beberapa literatur. Apa yang tampak dari wajah Saudi 30 tahun terakhir bukanlah wajah Saudi yang berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Corak keberislaman Saudi yang eksklusif dan menerapkan metode berpikir dialektis-dikotomis tersebut sudah membumi di Saudi sebelum revolusi Iran 1979. Puritanisme Islam Saudi tersebut sudah ada sejak awal kontrak politik terjalin antara Muhammad ibn Abd al-Wahhab dengan Muhammad ibn Saud. Dan, yang perlu diketahui bahwa Wahhabisme pernah digunakan oleh Saudi dan AS untuk meng-*counter* pengaruh ideologi politik yang diusung oleh Gamal Abd Nasser dari Mesir dan juga Muhammad Musaddeq dari Iran. Peristiwa ini terjadi sebelum revolusi 1979, atau tepatnya sekitar 1960-an, yang mana waktu itu juga terjadi ekspansi Wahhabisme ke seluruh dunia yang digerakkan oleh petrodollar, sebagaimana penulis sudah ulas di sub bab sebelumnya.

Persoalan yang selama ini mendera Saudi sebenarnya lahir dari dalam tubuh Saudi sendiri. Sejarah Saudi sejak berdiri hingga kini sebenarnya adalah sejarah kontradiksi akibat aliansi politik-agama yang membentuk Kerajaan Arab Saudi. Kontradiksi yang tidak jarang mengarah pada penentangan ulama

³¹ Martin Chulov, “I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince,” *The Guardian*, 2017, <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince%0D>.

Wahhabi terhadap modernisasi.³² Penentangan itu tampak nyata ketika terjadi peristiwa kudeta Makkah pada 22 November 1997 silam. Komplotan teroris yang merengsek masuk ke Masjid al-Haram dengan membawa senjata itu dipimpin oleh Juhaiman al-Utaibi, seorang khatib Badui berumur 43 tahun. Kebanyakan anggota komplotan ini adalah orang Saudi keturunan Badui yang merasa kedudukan mereka tergeser oleh orang-orang asing.³³ Percobaan kudeta ini yang mungkin dihubungkan oleh MBS dengan peristiwa revolusi Iran yang terjadi di tahun itu juga. Padahal peristiwa terorisme tersebut tidak ada hubungannya dengan revolusi Iran, dan dilakukan oleh sekelompok Wahhabi yang merasa tersisihkan dan tidak terima dengan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Saudi.

Jadi, berdasarkan data di atas, ketika MBS ingin merubah Islam Saudi menjadi lebih moderat, merupakan sebuah terobosan baru demi sukseksi proyek reformasinya. Memang sebelum MBS ada raja Abdullah yang juga pernah mewacanakan moderasi di Arab Saudi. Namun, rencana raja Abdullah tidak terealisasi dengan baik karena terhalang oleh dominasi Wahhabi yang begitu kuat. Yang perlu mendapatkan catatan, ulama Wahhabi dalam banyak hal punya semacam hak veto terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yang acap memaksa para raja Saudi mengikuti kemauan mereka, termasuk ketika Raja Fahd bin Abdulaziz (berkuasa 1982-2005) membuka kantor kebudayaan dan pendidikan di lebih dari 70 Kedubes Saudi di berbagai negara.³⁴

Yang tampak beberapa tahun terakhir, setelah visi 2030 diumumkan, langkah yang diambil MBS lebih berani dari raja Abdullah. Hal itu terlihat dari reformasi sosial yang dilakukan MBS secara radikal, yang dulu belum sempat disentuh oleh raja Abdullah. Misalnya, MBS menjamin partisipasi perempuan Saudi di ruang publik tanpa ada diskriminasi dari aparatus negara, semisal

³² Mashuri, "Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?"

³³ Yaroslav Trofimov, *Kudeta Makkah: Sejarah yang tak Terkuak*, ed. oleh A. Fathoni, trans. oleh Saidiman, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 8-9.

³⁴ Mashuri, "Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?"

polisi *syari'ah* atau *mutawa*. Selain itu, MBS juga berani membuka tempat-tempat hiburan yang bebas untuk kaum laki-lakin dan perempuan. Langkah tersebut diambil MBS dalam rangka melakukan reformasi sosial demi terwujudnya reformasi ekonomi Saudi. MBS ingin membawa keberislaman Saudi menjadi Islam moderat, sebagaimana Islam di belahan bumi lainnya yang terbuka untuk semua agama, suku, dan ras yang berbeda.

Kegagalan reformasi raja Abdullah karena adanya kontrol ulama konservatif yang begitu kuat. Ulama konservatif Saudi tidak menginginkan raja Abdullah menerapkan doktrin non-Wahhabi di sekolah-sekolah. Para ulama konservatif tersebut menginginkan puritanisme Islam khas Wahhabi tetap berjalan dan menjadi corak keberagaman Saudi. Namun, apa yang dialami raja Abdullah berbeda dengan yang dialami MBS. Untuk mewujudkan misi reformasinya, MBS yang diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak raja Salman, secara tegas menyatakan akan memberantas ekstrimisme yang bercokol di negerinya. Pernyataan tersebut disampaikan sang putera mahkota secara terbuka sebagaimana diberitakan *The Guardian*. Dalam kesempatan itu dia mengatakan: "Kami hanya kembali pada apa yang kami ikuti - Islam moderat yang terbuka bagi dunia dan semua agama. 70% orang Saudi berusia di bawah 30 tahun, jujur kami tidak akan menghabiskan 30 tahun hidup kami melawan pemikiran ekstremis, kami akan menghancurkan mereka sekarang dan segera."³⁵

Namun, tidak jelas siapa yang dimaksud MBS dalam pernyataan tersebut, apakah tertuju pada Wahhabi atau kelompok lain. MBS tidak secara spesifik menyebutkan kelompok tertentu. Kendati tidak menyebut nama, ulama Wahhabi dengan corak keberagaman yang konservatif dan puritan perlu lebih hati-hati dalam mengeluarkan statement. Karena yang menjadi skala prioritas MBS sekarang ini bukan *deal* politik dengan ulama Wahhabi - sebagaimana terjadi puluhan tahun silam, namun prioritas utama MBS ialah suksesi proyek reformasinya.

³⁵ Chulov, "I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince."

MBS, sebagai pemangku otoritas, mengesampingkan barisan ulama konservatif yang tak sejalan dengan ide reformasinya dan menuntut kesetiaan dari para pejabat senior untuk tetap di belakangnya dan mendukung proyek reformasi.³⁶ Hal ini berakibat buruk bagi para ulama atau imam Masjid di Saudi yang dianggap berideologi ekstrimis. Terhitung puluhan ulama dan imam masjid yang ditangkap beberapa tahun terakhir. Mereka ditangkap dengan beragam alasan yang dituduhkan, mulai dari berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, mengkritisi keterlibatan Saudi dalam perang Yaman, dan menentang kebijakan Kerajaan Saudi.

Berdasarkan kejadian tersebut, sepertinya moderasi Arab Saudi yang diinginkan MBS tidak bermaksud untuk menghapus jejak puritanisme Wahhabi atau doktrin Islam kaku lainnya, tetapi lebih pada pengkondisian rakyat Saudi untuk mengikuti corak keberislaman yang diinginkan Kerajaan Saudi. Islam yang seperti apa? Yaitu Islam yang moderat, terbuka, dan ramah pada investasi sehingga reformasi ekonomi yang diinginkan kerajaan bisa tercapai. Dalam konteks ini, ulama Wahhabi sebagai mitra lama penguasa Saudi tidak bisa berbuat banyak. Dengan segenap otoritas yang dimiliki, MBS terlalu berani dan kuat untuk menghukum siapa saja yang mengganggu agenda reformasinya. MBS bukan raja Abdullah yang bisa ditekan dan diatur oleh para ulama konservatif Wahhabi sehingga menggagalkan agenda reformasinya.

Memang, dalam suksesi pengangkatan pemimpin Kerajaan Saudi, keterlibatan ulama tidak bisa dinafikan. Dalam proses pengangkatan raja, seorang raja Saudi baru bergantung pada para pangeran lainnya untuk mengkonfirmasi posisinya dengan melakukan sumpah setia. Setelah proses itu, maka para ulama harus mendeklarasikan raja yang baru sebagai *imam* (pemimpin Muslim). Deklarasi ini hanya dapat dilakukan atas dasar fatwa bahwa suksesi itu sah. Persetujuan dari para ulama ini bukan hanya untuk mengukuhkan bahwa suksesi itu dilandasi atas dasar agama, tetapi juga

³⁶ Chulov, "I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince."

berfungsi sebagai pengingat bahwa di antara Keluarga Saud dan Wahhabi secara historis memiliki hubungan yang sangat dekat.³⁷

Secara teoritis, para ulama sebetulnya memiliki hak untuk memilih pemimpin yang berada di luar garis keturunan Saud yang dominan, tetapi pada faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Para ulama yang diberikan hak untuk mengeluarkan fatwa tergabung dalam Dewan Tinggi Agama, dan mereka dipilih oleh raja. Maka siapapun ulama yang berada di dalamnya, mereka tidak pernah memiliki pendapat yang independen, pengaruh anggota keluarga Saud senior di sana masih sangat besar.³⁸ Dalam posisi ini, ulama Wahhabi, meskipun mempunyai peran dan pengaruh dalam suksesi kerajaan Saudi, tidak bisa melampaui otoritas yang dimiliki oleh pihak kerajaan.

Dan, jangan lupa bahwa eksistensi keberislaman Wahhabi dulu bisa dominan di Saudi dan menyebar ke seluruh dunia berkat kekuatan politik dan petrodollar kerajaan Saudi. “Kegarangan” Wahhabi dulu dibutuhkan oleh penguasa Saudi tidak lain untuk kepentingan politik. Di antaranya, yaitu, untuk menangkal pengaruh sosialisme sekuler Nasser dan ekspor revolusi Iran yang dulu dianggap mengancam *status quo* kerajaan monarkhi tersebut. Untuk konteks sekarang, situasi dan kepentingan politik Saudi sudah berbeda. Karena itu, kebutuhan Kerajaan Saudi terhadap Wahhabisme pun tentu tidak sama. Kerajaan Saudi sekarang membutuhkan Islam moderat, bukan Islam puritan ala Wahhabi. Jadi, ulama Wahhabi sekarang tinggal memilih, apakah ingin mendukung atau melawan pihak kerajaan. Dan, semua pilihan memiliki konsekuensi masing-masing yang tertentu berdampak pada eksistensi Wahhabi di Saudi.

³⁷ Simon Handerson, *After King Fahd: Succession In Saudi Arabia* (Washington D.C.: The Washington Institute For Near Policy, 1995), 15, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37_AFTERKINGFAHD.pdf.

³⁸ Simon Handerson, *After King Fahd: Succession In Saudi Arabia* (Washington D.C.: The Washington Institute For Near Policy, 1995), 15, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37_AFTERKINGFAHD.pdf,16

Kesimpulan

Ditunjuknya MBS sebagai putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi membawa angin segar bagi rakyat Saudi yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang dogma agama puritan khas Wahhabi. Tidak hanya “berkah” bagi rakyat yang sudah lama mengimpikan kebebasan berekspresi, kehadiran MBS digadagadag menjadi “gerbong lokomotif” baru yang akan membawa masa depan Saudi menjadi lebih baik. Adalah Visi 2030, yang merupakan proyek besar MBS, di mana dalam proyek tersebut terkandung berbagai agenda reformasi, baik reformasi birokrasi, sosial, ekonomi, budaya, dan juga agama. Ide besar MBS itu muncul untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi yang sedari dulu bergantung pada minyak dan ingin dialihkan ke sektor lain, seperti pariwisata dan lainnya.

Kendati MBS masih berstatus sebagai putera mahkota, dengan otoritas yang dimilikinya, agensi MBS dengan kebijakan yang dilahirkan diakui sebagai suara otoritatif yang mewakili kehendak ayahnya, raja Salman. MBS menjadi “pemegang kunci” Kerajaan Saudi yang membawahi semua kebijakan yang ada di pemerintahan. Tak pelak, MBS sebagai pemangku otoritas berhasil merombak sistem dan juga peraturan yang berlaku di Arab Saudi selama ini, mulai dari keluarga kerajaan, minyak, dan juga konservatisme agama yang bercorak Wahhabi. Khusus yang terakhir, MBS memang tidak pernah spesifik ingin meninggalkan Wahhabi, tetapi dalam suatu wawancara dengan *The Guardian* MBS secara tegas akan menghapus ekstrimisme yang lahir dari dogma agama yang puritan, baik itu dari Wahhabi atau kelompok aliran keagamaan lainnya. MBS ingin memastikan Islam yang dianut rakyat Saudi harus seiring Islam yang diinginkan oleh Kerajaan. MBS ingin mengembalikan Islam Saudi menjadi Islam moderat, di mana semua agama, ras, dan budaya bisa diterima. Semua pihak harus mematuhi, tidak terkecuali penganut Islam ala Wahhabi.

Daftar Pustaka

- Al-Asymawi, Muhammad Said. *Ma'alim al-Islam*. 2 ed. Beirut: al-Instishar al-'Arabi, 2004.
- Algar, Hamid. *Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis*, trans. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Arabia, Kingdom of Saudi. Initiatives and Efforts to Combat Terrorism and Terror Financing, issued 2015. embassies.mofa.gov.sa/sites/Denmark/EN/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/Kingdom-of-Saudi-Arabia-Initiatives-and-Efforts-to-Combat-Terrorism-and-Terror-Financing.aspx.
- Bahgat, G. "Lower for Longer: Saudi Arabia Adjusts to the New Oil Era." *Middle East Policy* 23, no. 3 (2016): 39–48.
- Barthe, Benjamin. "Le fils du roi Salman, un héritier pressé et ambitieux en Arabie saoudite." *Le Monde*, 2016. www.lemonde.fr/international/article/2016/01/22/mbs-un-heritier-presse-et-ambitieux-en-arabiosaoudite_4852058_3210.html. Accessed 31 December 2016.
- Chulov, Martin. "I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince." *The Guardian*. 2017. <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi-arabia-moderate-islam-crown-prince%0D>.
- Esposito, John L. *Unholy War*. Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fadl, Khaled M. Abou El. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan*. Diterjemahkan oleh Helmy Musthafa. Jakarta: Serambi, 2005.
- Handerson, Simon. *After King Fahd: Succession In Saudi Arabia*. Washington D.C.: The Washington Institute For Near Policy, 1995. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37_AFTERKINGFAHD.pdf.
- Kinninmont, J. "Vision 2030 and Saudi Arabia's Social Contract: Austerity and Transformation." *Middle East and North Africa Programme*, 2017.
- Kumar, Deep. *ISLAM POLITIK Sebuah Analisis Marxis*. Jakarta: Resistbook & IndoPROGRESS, 2011.
- Mashuri, Ikhwanul Kiram. "Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?" *Republika*, 2017.

<https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/11/06/oyyiz5440saudi-tak-lagi-mengekspor-wahabi>.

Maulana, Noor Arif. *Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih*. Yogyakarta: Juxtapose Research dan Publication Study Club, 2003.

Perteghella, Annalisa, ed. *Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead*. Italy: Ledizioni LediPublishing, 2018.
https://www.academia.edu/39510960/Saudi_Arabia_at_a_Crossroads._Reforms_and_Uncertainties_Ahead.

Rahman, Musthafa Abd. "Timur Tengah Terbelah Dua." *Kompas*, 14 Desember 2007.

Sahide, Ahmad. *Ketegangan Politik Syi'ah-Sunni di Timur Tengah*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2013.

"Saudi youth unemployment forecast to exceed 42% by 2030." *Arabian Business*, 26 November 2016.

Trofimov, Yaroslav. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak*. Diedit oleh A. Fathoni. Diterjemahkan oleh Saidiman. 4 ed. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.

Violi, Saverio. "Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to 'Vision 2030.'" Ca' Foscari University of Venice, 2016.
https://www.academia.edu/31959468/Saudi_Arabia_Faced_with_Modernity_from_the_Demographic_Transition_to_Vision_2030.

Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan*. Bandung: Penerbit Mizan, 2018.

— — —. *Teori Interpretasi al-Qur'an Ibnu Rusyd: Kritik Hermeneutis-Ideologis*. Yogyakarta: LKiS, 2009.